

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PEMBINAAN PENDIDIKAN BERBASIS LAYAK ANAK DI  
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK TANJUNG PATI PADA MASA  
PANDEMI COVID-19 SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM PERADILAN  
PIDANA ANAK**

Oleh :

**REVANI ANGGIA IMANISA**

**1710111075**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA PK IV**



**Pembimbing :**

**Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.H**

**Dr. Nani Mulyati, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2022**

## ABSTRAK

Covid-19 merupakan pandemi yang melanda seluruh dunia. Seluruh aspek kehidupan terganggu, tidak terkecuali pendidikan. Banyak negara memutuskan untuk menutup kegiatan pendidikan sehingga banyak sekolah tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga merembes pada pelaksanaan pendidikan di LPKA Tanjung Pati yang terkendala dalam melaksanakan hak pendidikan anak. Selain hal tersebut, pelaksanaan pendidikan di LPKA dinilai tidak berbasis layak anak seperti yang diharapkan oleh Kemennppa. Pendidikan dinilai penting dalam mengurangi kenakalan remaja, dimana faktor pendidikan menjadi pengaruh pada tingkat kriminalitas remaja. Sementara pendidikan merupakan hak bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Dalam penelitian ini timbul permasalahan, yaitu: (1) Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan pendidikan berbasis layak anak di LPKA Tanjung Pati pada masa Covid-19 sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Anak? dan (2) Apa sajakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan pendidikan berbasis layak anak di LPKA Tanjung Pati pada masa Covid-19 sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Anak? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-empiris. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan pendidikan di LPKA Tanjung Pati belum maksimal karena adanya pandemi covid-19 membuat terhambatnya pendidikan bagi ABH dan pelaksanaan pendidikan di LPKA belum berbasis layak anak. Kemudian dalam pelaksanaan tersebut, didapatkan kendala-kendala berupa: (1) adanya pandemi covid-19, (2) kurang berminatnya ABH untuk mendapat pendidikan, (3) tidak adanya kurikulum khusus bagi pendidikan ABH, (4) keterbatasan tenaga pendidik, (5) kurang memadainya sarana dan prasarana, (6) minimnya alokasi anggaran untuk pendidikan, dan (7) kurangnya koordinasi dan kerjasama dengan kementerian/dinas pendidikan baik dari tingkat pusat, hingga tingkat kota. Dari hasil penelitian ini, disarankan untuk membentuk sistem pembelajaran untuk menyesuaikan kebutuhan dan kondisi yang dialami oleh ABH baik sesuai dengan usia, tingkat pendidikan, dan latar belakang ABH. Kemudian, memaksimalkan vaksin bagi ABH dan tenaga pengajar, merancang sistem pendidikan yang lebih kreatif dan menarik bagi ABH, dibentuknya kurikulum khusus untuk ABH dengan kerjasama antara Kemenkumham dengan Kemendikbud, melakukan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan untuk menyediakan tim pengajar, mengajukan penganggaran lebih banyak untuk menyelenggarakan pendidikan di wilayah LPKA, dan mengadakan kerjasama dengan Kementerian/Dinas Sosial untuk mengadakan pembimbing sosial.

**Kata Kunci:** Anak yang berhadapan dengan hukum, Tindak Pidana Anak, LPKA, Pembinaan dan Pendidikan Berbasis Layak Anak

